

## Evaluasi Program Perumahan Swadaya Di Kabupaten Boyolali

U. Ardiyanti<sup>1</sup>, W. Widjonarko<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup> Universitas Diponegoro, Indonesia

### Article Info:

Received: 10 January 2016

Accepted: 12 January 2016

Available Online: 11 July 2017

### Keywords:

evaluation, self-supporting

### Corresponding Author:

Utari Ardiyanti

Diponegoro University,

Semarang, Indonesia

Email: [utari.ardiyanti15@pwk.undip.ac.id](mailto:utari.ardiyanti15@pwk.undip.ac.id)

[pwk.undip.ac.id](http://pwk.undip.ac.id)

**Abstract:** *The number of uninhabitable housing is one of the main issues in Indonesia. Approximately 13.5 million backlog in Indonesia in which 3.4 million units are uninhabitable houses (Ministry of PUPR, 2015). In an effort to accelerate the realization of the ideals of society so that each family occupying the house livable in healthy neighborhoods with community involvement, it is necessary to the development of self-supporting housing. Starting from the concept of self-supporting housing idea as an alternative for the provision of housing development for low-income people in Boyolali, it needs to be replicated on the effectiveness of the implementation of self-supporting housing program in the field whether it is still appropriate as an alternative towards providing housing to community empowerment. This study aims to determine the success and effectiveness of the implementation of self-supporting housing program in Boyolali. The method used in this research is quantitative. Data collection techniques using observation, questionnaires with sampling technique is purposive sampling and using secondary data. The analysis used is descriptive analysis. Based on the research that has been done that the implementation of self-supporting housing program in Boyolali less successful in establishing appropriate housing, with the implementation of the program is less effective because the average percentage yield 45.63%. Such conditions can be seen from the aspect: Inaccuracy time reduction in funds, the recipient experienced a shortage of funds, lack of understanding by the recipient, the village chief task mismatch, no socialization and proposals by the community and less on target. Self-supporting housing program for the benefit of beneficiaries, in terms of health has been able to reduce the number of diseases associated with home is not livable. But in economic terms have not been able to significantly increase incomes.*

Copyright © 2016 JTPWK-UNDIP

This open access article is distributed under a Creative Commons Attribution (CC-BY-NC-SA) 4.0 International license.

Ardiyanti, U. & Widjonarko, W. (2016). Evaluasi Program Perumahan Swadaya Di Kabupaten Boyolali. *Jurnal Teknik PWK (Perencanaan Wilayah Kota)*, Vol 5 (1), 2016, 71-80

## 1. PENDAHULUAN

Perumahan merupakan kebutuhan dasar setiap manusia, hal ini didasari bahwa didalam UUD 1945 pasal 27 dan 28 tentang hak asasi manusia. Pasal 27 ayat 2 menyatakan bahwa "Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan". Penghidupan yang layak diartikan sebagai kemampuan dalam melakukan pemenuhan kebutuhan dasar seperti sandang, pangan dan papan. Selain itu dalam pasal 28 H ayat 1 menyebutkan bahwa "Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan". Hal ini menyebabkan negara memiliki kewajiban untuk mengakui hak atas standar hidup yang layak yaitu makanan, pakaian dan perumahan.

Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Kemenpera, sekitar 13.5 juta backlog (angka kekurangan rumah) di Indonesia sekitar 3.4 juta unit merupakan rumah tidak layak huni. Selain itu, diperkirakan penambahan backlog sekitar 800 ribu pertahun (Kementrian PUPR, 2015). Sehingga pemerintah belum berhasil dalam menyiapkan tempat tinggal bagi warga negaranya. Pembangunan perumahan memerlukan pendanaan yang besar dan sumber daya manusia. Akan tetapi sebagai negara berkembang, Indonesia mempunyai keterbatasan dalam pembangunan perumahan tersebut.

Salah satu upaya untuk mempercepat terwujudnya cita-cita masyarakat agar setiap keluarga menempati rumah layak huni dalam lingkungan pemukiman yang sehat dengan keterlibatan masyarakat, maka diperlukan adalah pembangunan perumahan swadaya. Program pembangunan perumahan dengan swadaya dilaksanakan melalui Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Dimana pedoman pelaksanaannya terdapat dalam Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Indonesia No 14 Tahun 2011, kemudian disempurnakan dengan Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Republik Indonesia No 06 Tahun 2013. Dalam Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Republik Indonesia Tahun 06 Tahun 2013 yang dimaksud dengan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya yang selanjutnya disingkat dengan BSPS adalah fasilitasi pemerintah berupa bantuan sosial kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah. Bantuan Stimulan mampu mengurangi sekitar 0,23% dari total backlog pada tahun 2011 (Juaniarko, 2011).

Program BSPS di Indonesia secara resmi mulai dilaksanakan sejak dikeluarkannya Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Indonesia No 14 Tahun 2011 yang merupakan pedoman dasar dalam pelaksanaan BSPS di Indonesia. Sejak dilaksanakan program ini telah mendapatkan hasil baik positif maupun negatif. Penelitian di Kabupaten Sragen menunjukkan hasil positif berupa keberhasilan fasilitator dalam melakukan fasilitasi program. Namun disamping itu program juga mendapatkan kendala menyangkut pembiayaan, ketidaksesuaian tugas kelompok masyarakat dan karakter sosial masyarakat (Wardani, 2010). Sedangkan penelitian di Kampung Melayu menunjukkan bahwa pelaksanaan program stimulan perumahan swadaya belum sesuai dengan Peraturan hal tersebut dikarenakan kriteria objek bantuan yang sedikit kurang tepat sasaran, syarat yang diajukan penerima bantuan terlihat tidak sesuai dengan aturan (Carolina, 2014).

Kabupaten Boyolali merupakan salah satu wilayah yang telah memenuhi kriteria untuk mendapatkan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya. Angka backlog di Kabupaten Boyolali mencapai 17.719 (DPD REI Jateng, 2013) dan jumlah rumah tidak layak huni di Kabupaten Boyolali diatas rata-rata jumlah rumah tidak layak huni nasional, yaitu mencapai 78.497 rumah (Bapermasdes Kabupaten Boyolali, 2013). Program perumahan swadaya tahun 2014 mencakup 739 KK di empat desa. Berdasarkan laporan yang disusun oleh tim fasilitator program bantuan stimulan perumahan swadaya Kabupaten Boyolali tahun 2014 program tersebut cukup berhasil. Namun keberhasilan tersebut diukur dari segi kuantitas. Seharusnya pembangunan perumahan bukan hanya berupaya untuk mencapai sasaran kuantitas saja tetapi penting memperhatikan agar perumahan berfungsi sebagaimana mestinya, oleh karena itu diperlukan evaluasi program perumahan swadaya di Kabupaten Boyolali. Evaluasi program mempunyai peranan yang penting, sebab banyak program yang selama ini dilaksanakan hanya berorientasi pada pemenuhan target group pembangunan, kurang mengetahui kegagalan dan keberhasilan serta tindak lanjut program. Kualitas evaluasi kinerja proyek pembangunan masih terbatas pada perkembangan pelaksanaan yang dilakukan melalui sistem pemantuan. Sedangkan evaluasi setelah proyek selesai atau berfungsi, yang dikenal sebagai performance evaluation, belum dilakukan sistematis dan melembaga (Sugito, 2002).

Penelitian ini dilakukan untuk mendeskripsikan efektivitas program dan untuk mengetahui faktor pendorong keberhasilan atau kegagalan program. Selanjutnya dengan mengetahui kekurangan, ketidakberhasilan dapat sebagai acuan untuk memberikan rekomendasi perbaikan perumusan kembali kebijakan program atau penyesuaian yang akan datang.

## 2. DATA DAN METODE

Penelitian yang digunakan dalam penelitian menggunakan metode kuantitatif. Teknik pengumpulan data merupakan cara untuk memperoleh data terkait tujuan dan kegunaan penelitian. Teknik pengumpulan data dijabarkan sebagai berikut :

### 1. Data Primer

- a. Observasi
- b. Kuesioner

Metode pengambilan sampling pada penelitian kuantitatif yang dilakukan adalah *non random* atau *non probability sampling*. Teknik sampling yang digunakan adalah *purposive sampling* dikarenakan penentuan sampel dilakukan dengan pertimbangan tertentu antara lain: (1) Luas wilayah studi, (2) Waktu penelitian yang terbatas, (3) Sumberdaya yang terbatas, (4) Dana yang terbatas, (5) Kemudahan pengambilan data.

**Tabel 1.** Distribusi Jumlah Responden (Analisis, 2015)

Desa	$\Sigma$ penerima bantuan	Jumlah Sampel
Keyongan	109	20
Gosono	100	20
Kadungpilang	131	20
Pakel	399	20
<b>Jumlah</b>	<b>739</b>	<b>80</b>

## 2. Data Sekunder

Pengumpulan data sekunder merupakan metode mengumpulkan data dari dokumen-dokumen rencana, peraturan perundangan serta data terkait dengan program perumahan swadaya. Metode analisis yang digunakan adalah Analisis Deskriptif. Hasil dari observasi dan kuesioner dideskripsikan dengan teknik deskriptif yang disesuaikan agar mudah dipahami dan diketahui hasilnya. Analisis deskriptif ini untuk memberikan gambaran mengenai objek penelitian yang diolah menggunakan cara-cara penyajian data dengan distribusi frekuensi, grafik, diagram, maupun dengan mean, median dan modus.

**Tabel 2.** Kategori Persentase Tingkat Keberhasilan Program (analisis, 2015)

Kategori	Persentase
Berhasil	66.8,% - 100%
Kurang Berhasil	33.4%-66.7%
Tidak Berhasil	0-33.3%

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil observasi lapangan dan data sekunder, hanya 55% atau separuh jumlah rumah terbangun yang memenuhi syarat rumah layak huni. Artinya dilihat dari jumlah rumah terbangun yang memenuhi syarat rumah layak huni dikatakan kurang berhasil. Sebab tujuan program bantuan perumahan swadaya adalah terbangunnya rumah tidak layak huni MBR atau masyarakat miskin menjadi layak huni melalui peningkatan kualitas dan pembangunan baru atau perbaikan total. Kriteria yang mendominasi penyebab rumah terbangun tidak memenuhi syarat rumah layak huni adalah lantai rumah dimana 42% masih dari tanah, ketidaktersediaan sirkulasi udara 31% dan ketidakmilikan kamar mandi jamban 25%. Sedangkan untuk dinding rumah sebagian besar penerima bantuan dinding rumah terbuat dari kayu atau batako atau bata merah. Atap rumah sebagian besar masih menggunakan genteng lama, meskipun dalam keadaan layak dan semua luas rumah diatas 36 m<sup>2</sup>. Untuk mengetahui faktor penghambat keberhasilan program bantuan perumahan swadaya di Kabupaten Boyolali dapat dilihat analisis dibawah ini.

### Faktor Penghambat Keberhasilan

Analisis faktor penghambat keberhasilan program adalah analisis yang bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan status keberhasilan program bantuan perumahan swadaya di Kabupaten Boyolali. Faktor penghambat keberhasilan :

#### 1. Biaya

Besaran alokasi anggaran dana berdasarkan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Pemberdayaan Perumahan Swadaya untuk peningkatan kualitas adalah Rp 7.500.000 sedangkan untuk pembangunan baru adalah Rp 15.000.000. Kesesuaian biaya di semua desa yang mendapat

bantuan tidak menemui masalah. Akan tetapi waktu penurunan dana mengalami keterlambatan. Dimana terdapat 2 tahap penurunan dana. Tahap pertama yaitu seharusnya turun 45 hari sejak dikeluarkannya surat penetapan penerima bantuan. Sedangkan tahap kedua seharusnya 3 bulan sejak dikeluarkannya surat penetapan penerima bantuan. Akan tetapi waktu penurunan dana atau bahan material terlambat 1-6 minggu dari jadwal yang ditentukan. Selain itu sebanyak 55% responden menyatakan kekurangan dana dalam pembangunan. Dikarenakan mayoritas penerima bantuan adalah masyarakat berpenghasilan rendah, selain karena pendapatan yang kecil juga tidak mempunyai tambahan dana untuk membangun rumah layak huni. Dengan jumlah bantuan Rp 7.500.000,- penerima bantuan hanya mampu membeli bahan bangunan seperti 1000 unit batako atau satu truk kecil pasir. Seperti kita ketahui bahwa untuk membangun sebuah rumah layak huni masih dibutuhkan bahan bangunan lainnya seperti semen, batu bata, genteng dengan jumlah yang tidak sedikit.

**Tabel 3.** Rumah Yang Tidak Memenuhi Syarat Rumah Layak Huni (Analisis, 2015)



## 2. Ketidaksiharian Aktor Yang Terlibat

Keterlibatan aktor terkait dalam perencanaan atau kegiatan adalah pemangku kepentingan yang seharusnya terlibat sesuai dengan petunjuk teknis program perumahan swadaya. Pemangku

kepentingan yang tidak berperan sesuai tugasnya disini adalah Kepala Desa. Kepala Desa seharusnya menerima permohonan proposal bantuan dari masyarakat akan tetapi sebab tidak ada penyusunan proposal. Selain itu Kepala desa di salah satu desa ikut serta dalam membantu menarik dan mentransfer dana bantuan ke toko bahan bangunan. Hal tersebut mengakibatkan adanya penerima bantuan kurang tepat sasaran, karena penerima bantuan kerabat dari kepala desa. Selain itu KPB atau kelompok penerima bantuan adalah penerima bantuan itu sendiri. Tugas penerima bantuan selain ketentuan yaitu mengusulkan rencana kebutuhan pembangunan rumah swadaya kepada TPM dan mengkonsultasikan pelaksanaan pembangunan rumah swadaya kepada TPM adalah diperlukan penerima bantuan yang mempunyai kompetensi yang unggul atau ahli didalam bidangnya. Akan tetapi dikarenakan sosialisasi yang diberikan hanya sebatas agenda pembentukan kelompok bantuan, penunjukan toko bangunan dan penyusunan penggunaan dana sehingga mengakibatkan kurangnya pemahaman masyarakat mengenai tujuan perumahan swadaya dan rumah layak huni

### 3. Mutu Pekerjaan

Mutu pekerjaan adalah proses atau cara pelaksanaan pekerjaan harus memenuhi standar pedoman pelaksanaan program perumahan swadaya. Mutu pekerjaan yang menjadi penghambat keberhasilan program adalah ketidaksesuaian mekanisme program dengan yang dilaksanakan dilapangan. Tidak terdapat sosialisasi diawal program ke seluruh masyarakat dan pengajuan proposal bantuan oleh masyarakat. Dengan alasan terbentur waktu yang singkat maka tidak ada sosialisasi dan pengajuan proposal. Sehingga penerima bantuan yang dipilih oleh fasilitator atau Tenaga Pendamping Masyarakat beserta perangkat desa yang ditunjuk kemudian baru melengkapi persyaratan sesuai Perppera No 6 Tahun 2013.

### 4. Faktor Perencana

Berdasarkan Peraturan Kementrian Perumahan Rakyat Republik Indonesia No 6 Tahun 2013. Penerima bantuan perumahan swadaya adalah dengan kondisi rumah genteng tak layak, dinding dari bambu atau kayu dan lantai dari tanah serta pendapatan kurang dari Rp 600.000/bulan. Berdasarkan hasil kuesioner penerima bantuan dengan pendapatan kurang dari Rp 600.000/bulan tidak lebih dari 40%. Sedangkan berdasarkan kondisi rumah sebelum pembangunan sebanyak 38.75% responden yang memenuhi syarat rumah tidak layak huni. Hal ini disebabkan karena tidak adanya sosialisasi di awal program secara menyeluruh, sehingga tidak semua masyarakat mengetahui informasi program. Sosialisasi hanya diberikan kepada penerima bantuan. Maka kemungkinan penerima bantuan membuat data curang tentang keadaan rumah. Selain itu karena tidak ada sosialisasi menyeluruh, memungkinkan masih adanya masyarakat yang sebenarnya lebih berhak mendapat bantuan.

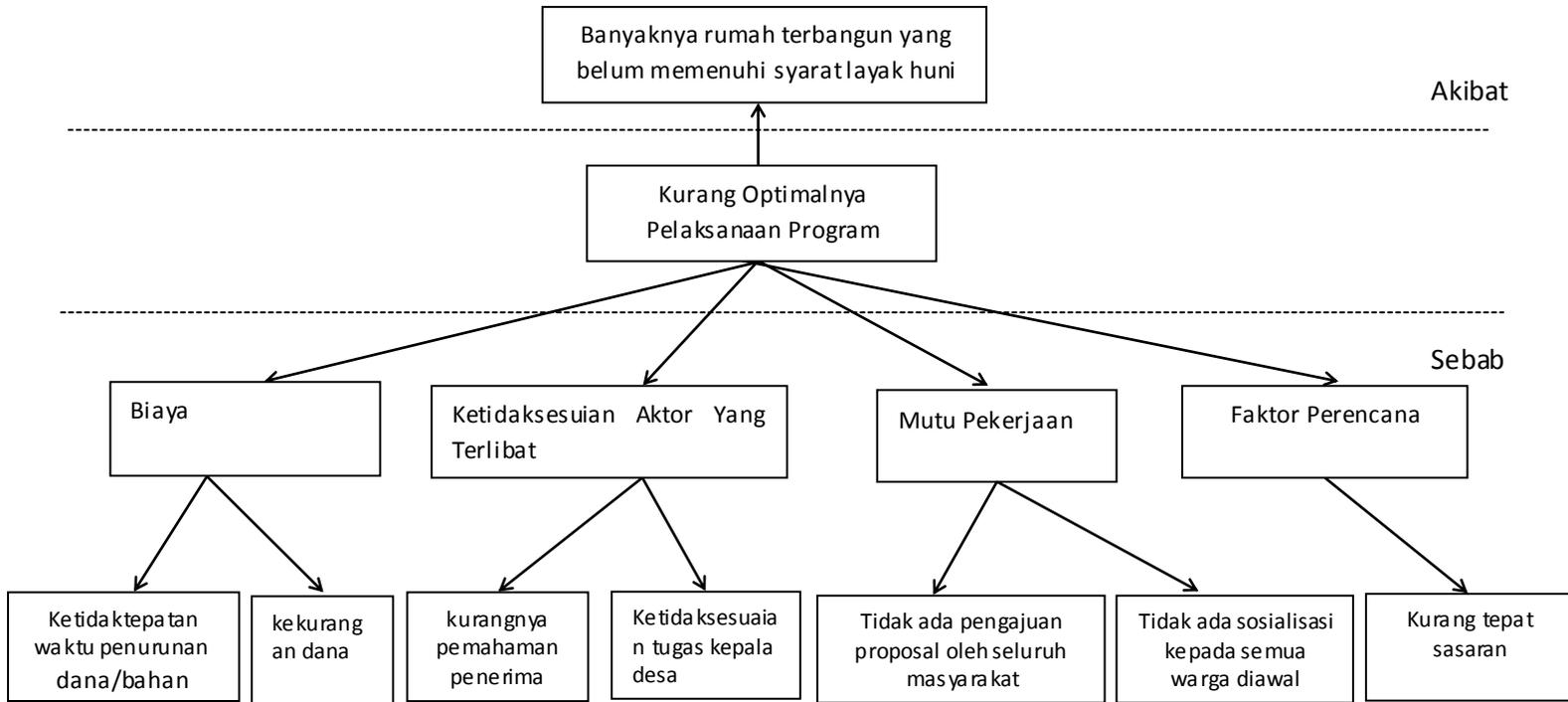
## Akar Masalah

Untuk mengetahui sebab akibat masalah yang ada digunakan analisis pohon masalah. Analisis pohon masalah sebagai suatu teknik untuk mengidentifikasi semua masalah dalam suatu situasi tertentu dan memperagakan informasi ini sebagai rangkaian hubungan sebab akibat. Pohon masalah dibawah ini dibuat dengan cara menempatkan masalah utama pada titik sentral atau di tengah gambar. Selanjutnya, penyebab munculnya persoalan tersebut ditempatkan di bagian bawahnya (alur ke bawah) dan akibat dari masalah utama ditempatkan di bagian atasnya (alur ke atas).

Analisis pohon masalah pada prioritas masalah kurang optimalnya pelaksanaan program perumahan swadaya seperti digambarkan pada bagan pohon masalah dibawah. Masalah utama diletakkan pada bagian tengah yang digambarkan sebagai batang pohon. Selanjutnya, dari batang pohon dianalisis akar pohon yaitu penyebab timbulnya masalah utama. Penyebab langsung dari biaya proyek adalah waktu penurunan bahan material yang tidak sesuai jadwal, keterlambatan penurunan bahan material disebabkan karena berbagai alasan seperti toko bangunan tidak mempunyai stok bahan bangunan yang cukup banyak, pada waktu penurunan dana terjadi kenaikan harga bbm sehingga menyebabkan harga bahan material yang berbeda dan adanya ikut campur stakeholder yang menyebabkan keterlambatan penurunan. Selain itu karena kekurangan dana oleh penerima bantuan sebab kesiapan dana tambahan dan partisipasi setiap penerima bantuan berbeda. Penyebab langsung dari ketidaksesuaian aktor yang terlibat adalah kurangnya pemahaman masyarakat mengenai tujuan pembangunan rumah swadaya sebab tidak adanya sosialisasi yang menyeluruh diawal program. Selain itu ketidaksesuaian tugas kepala desa dengan ketentuan. Penyebab langsung dari mutu pekerjaan adalah ketidaksesuaian mekanisme pelaksanaan pembangunan dilapangan ketentuan dengan pelaksanaan dilapangan sebab tidak adanya sosialisasi program secara

menyeluruh diawal program dan pengajuan proposal bantuan oleh masyarakat. Penyebab langsung dari ketidaksesuaian faktor perencana adalah tidak adanya sosialisasi kepada semua warga diawal program, sehingga mengakibatkan kurang tepat sasaran penerima bantuan. Kemudian menganalisis cabang dari batang pohon atau dampak yang ditimbulkan dari masalah utama. Dampak yang timbul dari kurang optimalnya pelaksanaan program adalah banyaknya rumah terbangun yang belum memenuhi sebagai rumah layak huni.

**Gambar 1.** Pohon Masalah (analisis, 2015)



**Tindak Lanjut**

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap program perumahan swadaya di Kabupaten Boyolali, pelaksanaan program kurang berhasil dalam membangun rumah layak huni secara signifikan. Untuk meningkatkan pelaksanaan program perumahan swadaya diperlukan tindak lanjut untuk mengatasi permasalahan antara lain sebagai berikut :

**Tabel 4.** Tindak Lanjut Atas Permasalahan (analisis, 2015)

Temuan Masalah	Tindak Lanjut
<b>Ketidaktepatan waktu penurunan dana</b>	Diperlukan monitoring kegiatan waktu penurunan dana agar jadwal penurunan dana sesuai dengan ketentuan
<b>kekurangan dana</b>	perlu adanya kerjasama dengan lembaga ekonomi agar penerima bantuan yang kekurangan dana mendapatkan bantuan keuangan sehingga bisa mengoptimalkan pembangunan rumah yang layak huni.
<b>kurangnya pemahaman penerima bantuan</b>	Diperlukan sosialisasi kepada semua masyarakat mengenai bantuan stimulan perumahan swadaya. Sehingga semua masyarakat mendapatkan informasi dan meningkatkan kesadaran partisipasi masyarakat tentang rumah layak huni
<b>Ketidakesuaian tugas kepala desa</b>	Diperlukan pengawasan agar stakeholder berperan sesuai dengan tugasnya

<b>Tidak ada pengajuan proposal oleh seluruh masyarakat</b>	Diperlukan monitoring disetiap kegiatan agar setiap kegiatan dalam pembangunan perumahan swadaya berjalan dengan lebih baik. Selain itu diperlukan kesiapan program agar persiapan program bantuan perumahan swadaya tidak mendadak.
<b>Tidak ada sosialisasi kepada semua warga diawal program</b>	Diperlukan monitoring disetiap kegiatan agar setiap kegiatan dalam pembangunan perumahan swadaya berjalan dengan lebih baik. Selain itu diperlukan kesiapan program agar persiapan program bantuan perumahan swadaya tidak mendadak.
<b>Kurang tepat sasaran</b>	Diperlukan inisiasi kapaitas keuangan penerima bantuan sehingga terdapat mobilisasi soal dana material

**Efektifitas Program**

Keberhasilan program diukur dengan tidak hanya berdasarkan jumlah rumah terbangun akan tetapi perlu dilihat apakah rumah terbangun tersebut sudah efektif atau belum. Untuk itu diperlukan analisis efektifitas program perumahan swadaya di Kabupaten Boyolali. Efektivitas adalah kesesuaian antara output dengan tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas juga dimaknai penilaian untuk melihat capaian hasil terhadap tujuan yang telah ditetapkan dalam program. Analisis efektifitas program perumahan swadaya ini dilakukan untuk melihat langsung dampak yang ditimbulkan atas pembangunan rumah swadaya

**Tabel 5.** Analisis Efektivitas Progran (analisis, 2015)

Aspek	Analisis
Kegiatan Sosialisasi	kegiatan sosialisasi dinilai tidak efektif. Sebab berdasarkan persentase hasil kuesioner tergolong tidak efektif. Sedangkan menurut TPM karena terbentur waktu yang singkat maka tidak ada sosialisasi. Sosialisasi baru dilaksanakan ketika sudah terdapat penetapan penerima. Implikasi karena tidak ada kegiatan sosialisasi yang menyeluruh kepada warga pada awal program adalah tidak semua masyarakat mengetahui informasi program bantuan stimulan perumahan swadaya.
Proposal Bantuan Oleh Masyarakat	proposal bantuan dinilai tidak efektif. Sebab berdasarkan persentase hasil kuesioner tergolong tidak efektif. Sedangkan menurut TPM pemilihan penerima bantuan dilakukan dengan cara langsung pendataan Rumah Tangga Miskin atau yang memenuhi persyaratan administrasi dan teknis. Sehingga pengumpulan berkas perlengkapan dilakukan oleh penerima bantuan yang ditunjuk. Implikasi karena tidak ada kegiatan penyusunan proposal adalah penerima bantuan kemungkinan tidak tepat sasaran
Penerima Bantuan	Penerima bantuan dinilai kurang efektif. Sebab berdasarkan persentase hasil kuesioner tergolong kurang efektif. Sedangkan berdasarkan pemerintah, penerima bantuan sudah efektif karena pemilihan penerima bantuan dipilih berdasarkan survey memenuhi persyaratan administrasi dan teknis. Implikasi kurang efektif penerima bantuan adalah masih banyaknya rumah tangga yang memenuhi syarat yang berhak mendapatkan bantuan.
Penyaluran Dana	penyaluran dana dikatakan kurang efektif. Sebab berdasarkan persentase hasil kuesioner tergolong efektif. Tetapi dari segi waktu penurunan dana mengalami keterlambatan. Implikasi dari kurang efektifnya penyaluran dana adalah keterlambatan waktu penyelesaian.

Pembangunan Rumah	Pembangunan rumah dinilai kurang efektif. Sebab berdasarkan persentase hasil kuesioner tergolong kurang efektif. Hasil observasi rumah yang memenuhi syarat berdasarkan Permenpera No 6 Tahun 2013 yang disesuaikan dengan Kepmen Kimpraswil No.403/KPTS/M/2002 tentang Pedoman umum pembangunan rumah sehat hanya 55% atau separuhnya. Sedangkan berdasarkan pemerintah sudah berhasil karena jumlah rumah terbangun adalah 94% rumah. Implikasi kurang efektifnya pembangunan rumah adalah rumah swadaya yang terbangun tidak memenuhi syarat rumah layak huni.
Pendampingan Pembangunan Rumah	Pendampingan pembangunan dinilai efektif. Sebab berdasarkan persentase hasil kuesioner tergolong efektif. Bertanggung jawab dengan baik dapat dibuktikan kesesuaian dengan aturan dengan adanya progresss pekerjaan mulai 0%, 30% dan 100%.

**Outcome Program**

1. Penyakit terkait rumah tidak layak

Beralihnya rumah tidak layak huni menuju rumah yang sehat dan layak memungkinkan penghuni atau masyarakat memperoleh derajat kesehatan yang optimal. Hal tersebut sesuai dengan salah satu tujuan penggunaan dana bantuan rumah swadaya yaitu untuk meningkatkan kualitas kesehatan rumah terbangun (Permenpera No 6 Tahun 2013). Sehingga dengan meningkatnya ketahanan fisik rumah, diharapkan kualitas kesehatan warga meningkat.

**Tabel 6.** Jumlah Penyakit Berkaitan Rumah Tidak Layak Huni

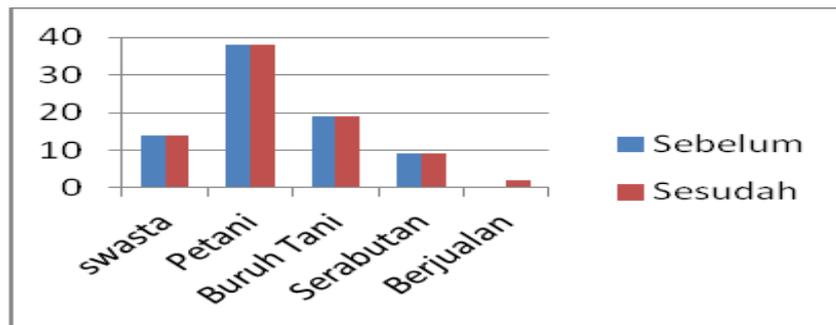
Desa	2013				2014				2015			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
<b>Keyongan</b>	13	2	66	72	15	3	75	48	16	2	63	50
<b>Pakel</b>	67	2	60	32	78	2	68	29	59	1	56	31
<b>Gosono</b>	53	2	64	45	50	1	63	33	50	2	60	37
<b>Kedungpilang</b>	13	1	65	30	11	2	65	24	10	0	62	28

Keterangan :  
 1=kulit      3=batuk dan flu  
 2=TBC      4=perut

Dengan demikian maka dapat disimpulkan bahwa program perumahan swadaya sudah mampu menurunkan jumlah penyakit yang berhubungan dengan rumah tidak layak huni meskipun masih terdapat beberapa jenis penyakit mengalami fluktuasi dan kenaikan.

2. Ekonomi

Pendapatan merupakan sarana untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Dengan adanya program bantuan perumahan swadaya di Kabupaten Boyolali selain bertujuan mengurangi rumah tidak layak huni, juga diharapkan dapat meningkatkan pendapatan ekonomi penerima bantuan. Kehidupan ekonomi penerima bantuan program perumahan swadaya didominasi oleh masyarakat berpenghasilan rendah. Sebagian besar masyarakat bekerja sebagai petani, karena wilayah penerima bantuan dipedesaan.

**Gambar 2.** Pekerja penerima Bantuan Sebelum dan Sesudah Melakukan Pembangunan (analisis, 2015)

Program perumahan swadaya belum mampu meningkatkan pendapatan masyarakat. Karena hanya mengalami peningkatan 2.5% atau sangat kecil. Dari analisis diatas memberikan gambaran bahwa program perumahan swadaya dikatakan hanya menyentuh aspek fisik saja sedangkan aspek ekonomi tidak dibina maka tidak ada pengaruh yang signifikan.

#### 4. REFERENSI

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan bahwa pelaksanaan program perumahan swadaya di Kabupaten Boyolali kurang berhasil membangun rumah layak huni, dengan pelaksanaan program kurang efektif karena rata-rata hasil persentase 45.63%. Masalah yang menyebabkan program belum berhasilnya membangun jumlah rumah layak huni antara lain : Ketidaktepatan Waktu penurunan dana, penerima bantuan mengalami kekurangan dana, kurangnya pemahaman penerima bantuan, Ketidakesesuaian tugas kepala desa, tidak ada sosialisasi dan pengajuan proposal oleh masyarakat serta kurang tepat sasaran

#### 5. REFERENSI

- Bamberger, M., & Hewitt, E. (1986). *Monitoring and evaluating urban development programs: a handbook for program managers and researchers*. The World Bank.
- Bredenoord, J. (2009). The people's struggle for affordable living space. The role of (assisted) self-help housing from 1950–2010 and beyond.
- Budiyanti, T. (2003). *Evaluasi Rencana Teknik Ruang Kawasan Khusus Permukiman Flamboyan Bawah Danau Seha Kota Palangkaraya*. Tesis S-2. Program Studi Magister Teknik Pembangunan Kota, Program Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang
- Carolina, A., Loesida, R., & Suratman, S. (2014). *ANALISIS PELAKSANAAN BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA (BSPS) PROGRAM BEDAH RUMAH DI KELURAHAN KANDANG KECAMATAN KAMPUNG MELAYU* (Doctoral dissertation, Universitas Bengkulu).
- Conyers, D. (1994). *Perencanaan sosial di dunia ketiga: suatu pengantar*. Gadjah Mada University Press.
- Harris, R. A *Double Irony: the Originality and Influence of John F.C Turner*. Habitat International, 27(2), 245-269, 2003
- Heripoerwanto, E. (2012). *Perencanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya*. Bimbingan Teknis Dekonsentrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman
- Indonesia, K. N. P. R. R. (2013). *Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor: 06. PERMEN/M/2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya*. Jakarta: Kementerian Negara Perumahan Rakyat Republik Indonesia.
- Indonesia, R. (2002). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Sekretariat Jenderal MPR RI.
- Kementerian PUPR Siap Lanjutkan Program Bedah Rumah. Diunduh Senin, 20 April 2015. <http://pu.go.id>.
- Juniarko, O. (2012). *Evaluasi Sistem Bantuan Stimulan Pembiayaan Perumahan Swadaya Di Kabupaten Malang*. Tesis S-2. Program Magister Teknik Sipil Minat Perencanaan Wilayah dan Kota Fakultas Teknik Universitas Brawijaya Malang
- Kurniasih, S. (2007). *Usaha Perbaikan Permukiman Kumuh Di Petukangan Utara-Jakarta Selatan*. Jakarta. Universitas Budi Luhur

- Listya, H. (2010). *Pengaruh Partisipasi Masyarakat terhadap Tingkat Keberhasilan Proyek Pemberdayaan Masyarakat di Kabupaten Banyuwangi*. Tesis S-2. Surabaya: Institut Teknologi Sepuluh Nopember.
- Leksatyaji, A. R. 2010. Karakteristik rumah swadaya ditinjau dari pola produksi rumah di Kota Semarang. Skripsi S-1. Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota Fakultas Teknik Universitas Diponegoro
- Mungkasa, O. 2012. Perumahan Swadaya Konsep, Pembelajaran dan Praktek Unggulan. (15 Mei 2015) [www.academia.edu/2641557/perumahan\\_swadaya\\_konsep\\_pembelajaran\\_dan\\_praktek\\_unggulan](http://www.academia.edu/2641557/perumahan_swadaya_konsep_pembelajaran_dan_praktek_unggulan)
- No, U. U. (1). Tahun 2011 tentang Perumahan dan Permukiman.
- Ntema, L. J. (2011). *Self-help housing in South Africa: Paradigms, policy and practice* (Doctoral dissertation, University of the Free State).
- Panudju, B. (1999). *Pengadaan Perumahan Kota dengan Peran Serta Masyarakat Berpenghasilan Rendah*. Alumni.
- Sugito. 2002. *Studi Evaluasi Program Pembangunan Prasarana Pendukung Desa Tertinggal Studi Kasus di Kabupaten Grobogan*. Tesis S-2. Program Studi Magister Ilmu Administrasi, Program Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang
- Sujarweni, W. 2014. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: PT Pustaka Baru.
- Tanpa Angka Tahun. *Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Berbasis Lingkungan*. Diunduh Rabu, 5 Agustus 2015. <http://new.pamsimas.org>.
- Turner, J. F., & Fichter, R. (Eds.). (1972). *Freedom to build: dweller control of the housing process*. Macmillan.
- Umar, H. (2002). *Evaluasi kinerja perusahaan*. Gramedia Pustaka Utama.
- Wardani, F. N. H. K. 2010. *Tingkat Keberhasilan Implementasi Program bantuan Stimulan Pembangunan Perumahan Swadaya dan peningkatan Kualitas Perumahan di Kabupaten Sragen*. Skripsi S-1. Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota Jurusan Arsitektur Fakultas Teknik Universitas Sebelas Maret Surakarta.
- William, N. D. (2003). Pengantar Analisis Kebijakan Publik. *Gajah Mada University Press, Yogyakarta*.
- Wulandari, P. R. 2013. *Analisis Partisipasi Masyarakat dan Kepemimpinan Terhadap Tingkat Keberhasilan Proyek Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan di Kecamatan Gerokgak, Buleleng*. Tesis S-2. Program Magister Program Studi Ilmu Ekonomi Program Pascasarjana Universitas Udayana Denpasar
- Yudohusodo, S. (1991). *Rumah untuk seluruh rakyat*. INKOPPOL, Unit Percetakan Bharakerta.
- Zhang, L., Zhao, S.X.B. and Tian, J.P. *Self-Help in Housing and Chengzhongcun in China's Urbanisation*. International Journal of Urban and Regional Research, 27(4), 912-937, 2003